



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, JAMSOSTEK DAN DJSN)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : II
Jenis : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : DPRD Kota Jayapura
Sifat : **Terbuka**
Hari, tanggal : Rabu, 24 Pebruari 2010
Waktu : Pukul 16.00 WIB - selesai
Ketua Rapat : Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I
Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara : Membicarakan kebijakan nasional tentang pembangunan kesehatan dan ketenagakerjaan
Jumlah kehadiran : 4 Anggota Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Jayapura dibuka pukul 16.00 WIB dan rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Ketua DPRD Kota Jayapura menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
Di bidang Kesehatan :
 - a. Kota Jayapura sangat memerlukan dokter ahli/ spesialis, bidan, dan perawat dan tenaga kesehatan lainnya, sarana dan prasana serta fasilitas untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua. Misalnya Rumah Sakit Perbatasan di Muara Tani, ada alat kesehatan namun tidak dapat digunakan karena tidak ada tenaga kesehatan yang mengoperasikan alat tersebut.
 - b. Hingga saat ini Rumah Sakit Daerah di Kota Jayapura sudah 6 (enam) bulan tidak melakukan operasi bagi pasien.
 - c. Adanya Puskesmas Plus namun kondisi dan pelayanan kesehatan tidak memadai.

- d. Perlu adanya pelatihan dan intensif bagi dokter sebagai bentuk perhatian Pemerintah terhadap dokter.
 - e. Diseluruh Provinsi Papua sudah mencanangkan desa siaga namun masih memerlukan tenaga perawat dan bidan sebanyak 2.000 orang.
 - f. Provinsi Papua merupakan daerah no.2 kasus penyakit HIV dan AIDS tertinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan tingginya penularan HIV dan AIDS pada penduduk dewasa umur 15-19 tahun.
 - g. Kota Jayapura sangat memerlukan Rumah Sakit Khusus Penyakit Kusta karena tingkat penderita kusta sangat tinggi hingga saat ini terdapat kurang lebih 900 orang pengidap penyakit kusta.
 - h. DPRD Kota Jayapura mengadakan koordinasi dengan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Papua untuk meningkatkan PAD guna menanggulangi tingkat pengangguran dengan cara membentuk padat karya.
2. Komisi IX DPR RI menyarankan kepada DPRD Kota Jayapura untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua mengenai anggaran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua untuk memprioritaskan program-program yang menyentuh kepentingan rakyat.
 3. DPRD Kota Jayapura perlu berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih untuk melakukan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas.
 4. Komisi IX DPR RI dapat memahami aspirasi dan masukan dari DPRD Kota Jayapura dan merencanakan untuk melakukan kunjungan kerja ke Kota Jayapura agar dapat melihat secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Jayapura.

III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI dapat memahami aspirasi dan masukan dari DPRD Kota Jayapura dan merencanakan untuk melakukan kunjungan kerja ke Kota Jayapura agar dapat melihat secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Jayapura.

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB

Jakarta, 24 Pebruari 2010
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ